

Pusat dan Periphery: Memahami Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan

¹Uken Sutisna, ²Rayhan Anwarul Umam, ³Buci Morisson*

^{1,3}Universitas Negeri Yogyakarta, ²SMA PGRI Cicurug

¹ukensutisna.2023@student.uny.ac.id, ²rayhanumam39@gmail.com,

³bucimorisson@staidasukabumi.ac.id

ABSTRACT

Economic inequality between regions in Indonesia is still a major challenge, especially between Java, which is the center of the economy, and other regions such as Papua, Maluku, and Kalimantan, which are experiencing delays in development. This inequality is caused by several factors, such as centralized development policies, lack of infrastructure in certain regions, and high dependence on natural resources. This study aims to identify the causes of such inequality and offer solutions that can reduce the gap between regions. The approach used in this research is qualitative analysis by examining data related to economic growth, poverty rates, and the distribution of development between regions. The results show that inequality is mostly influenced by imbalances in investment and government attention to regions outside Java. Proposed solutions include decentralizing development, improving infrastructure in underdeveloped regions, and encouraging economic diversification to create more equitable opportunities. This research is expected to provide useful insights for a more inclusive development policy, so that all regions of Indonesia can develop sustainably and more equitably.

Keywords: core, economic inequality, periphery, sustainable development.

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama antara Pulau Jawa yang menjadi pusat perekonomian dan wilayah-wilayah lainnya seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan yang mengalami keterlambatan dalam pembangunan. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pembangunan yang terpusat, kurangnya infrastruktur di daerah-daerah tertentu, dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab ketimpangan tersebut dan menawarkan solusi yang dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengkaji data terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan distribusi pembangunan antar wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakseimbangan investasi dan perhatian pemerintah terhadap wilayah di luar Jawa. Solusi yang diusulkan mencakup desentralisasi pembangunan, peningkatan infrastruktur di wilayah tertinggal, serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk menciptakan peluang yang lebih merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, agar seluruh wilayah Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan lebih seimbang.

Kata kunci: ketimpangan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pinggiran kota, pusat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi dengan kekayaan sosial-ekonomi yang sangat beragam. Perbedaan karakteristik masyarakat di setiap wilayah serta perbedaan kekayaan sumber daya alam menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah (Edison & Andriansyah, 2023). Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih sulit dan pemerataan pembangunan menjadi tidak optimal (Saraswati & Adi, 2022). Terlebih, sejak dahulu pembangunan lebih cenderung dominan di satu wilayah yakni di Pulau Jawa. Jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh lebih dominan di Pulau Jawa, maka akan menimbulkan disparitas pertumbuhan ekonomi regional. Konsekuensi dari adanya gap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat (Ramadhan et al., 2024).

Untuk mengetahui kondisi ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia sebenarnya kita bisa dilihat dari besaran kontribusi provinsi terhadap PDB nasional. Faktanya, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,69 %, sedangkan kelompok Pulau Maluku dan Papua hanya mencapai angka 2,36% (terendah dibandingkan pulau lainnya) (Digdowiseiso & Rengganisa, 2023). Perbedaan yang jauh tersebut memberikan gambaran bahwa terjadi ketimpangan struktural dalam perekonomian Indonesia. Ketimpangan ekonomi ini berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat di daerah-daerah tertinggal, dengan banyaknya wilayah yang masih minim infrastruktur, pendidikan, serta fasilitas kesehatan (Hulu & Wahyuni, 2021). Di Papua, misalnya, tingkat kemiskinan mencapai 26,8% pada 2023, jauh di atas rata-rata nasional. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin dalam dan berisiko memperburuk ketidakadilan antar wilayah.

Secara historis, jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian secara umum cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk di pulau tersebut sangat tinggi dan tidak seimbang dengan pulau-pulau lain di luar Jawa (Simanjuntak et al., 2024). Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa mayoritas berasal dari wilayah Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan kota-kota sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) yang mencapai 20,85% . Dari sisi PDB per kapita, DKI Jakarta melaporkan nilai sebesar Rp 274,7 juta, sedangkan rata-rata nasional hanya Rp 62,2 juta. Dengan kata lain, PDB per kapita Jakarta empat kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDB per kapita nasional (Katadata, 2022). Jika kita mengatasi situasi ini tanpa upaya serius, ketimpangan akan semakin parah. Keadaan tersebut dikarenakan wilayah pinggiran atau *periphery* yang bergantung pada sektor sumber daya alam sering kali tidak mendapatkan manfaat maksimal karena kurangnya pengembangan pada sektor lainnya (Hartati, 2022). Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat dikurangi dengan kebijakan desentralisasi yang lebih efektif, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan

sektor ekonomi yang lebih beragam di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada sumber daya alam.

Penelitian ini sangat penting karena ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut dapat menghambat pencapaian pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Jika dibiarkan, ketimpangan ini akan memperburuk kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal dan menghambat potensi mereka untuk berkembang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penyebab utama ketimpangan antar wilayah, serta mencari solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan tersebut (Dai et al., 2023). Penelitian ini akan fokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan, seperti kebijakan pembangunan yang terpusat di Jawa, ketergantungan daerah pada sumber daya alam, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penulis akan mengumpulkan data sekunder, yang mencakup informasi mengenai tingkat ekonomi setiap wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi infrastruktur dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian terkait, serta laporan penelitian dan literatur yang relevan (B. Morisson, 2022). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi kebijakan pembangunan yang ada, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan, dan merumuskan solusi yang mungkin diterapkan.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup perbandingan antara Pulau Jawa yang relatif maju dan wilayah Indonesia Timur yang lebih tertinggal. Fokus utama penelitian adalah pada faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, seperti terbatasnya akses infrastruktur, rendahnya keberagaman ekonomi di daerah tertentu, serta kebijakan pembangunan yang lebih menguntungkan wilayah Barat Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji kebijakan desentralisasi dan diversifikasi ekonomi sebagai solusi untuk meratakan pembangunan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan infrastruktur yang lebih merata, kebijakan desentralisasi yang lebih efektif, dan diversifikasi ekonomi yang mendalam, diharapkan kesenjangan yang ada dapat berkurang secara signifikan, sehingga menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Struktural Penyebab Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia merupakan dampak dari berbagai faktor struktural yang saling berhubungan, menciptakan kesenjangan yang semakin sulit diatasi jika tidak ada upaya serius dan menyeluruh. Berikut adalah pembahasan faktor-faktor penyebab utama ketimpangan wilayah di Indonesia (Santi & Iskandar, 2021):

a. Kebijakan Pembangunan yang Terpusat di Pulau Jawa

Sejak masa awal pembangunan nasional, Pulau Jawa telah menjadi pusat perhatian pemerintah sebagai poros utama kegiatan ekonomi, politik, dan sosial. Posisi strategis Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan lokasinya yang relatif dekat dengan jalur perdagangan internasional menjadikannya prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik (Farhan & Sugianto, 2022). Akibatnya, daerah-daerah di luar Jawa sering kali terpinggirkan dari alokasi anggaran pembangunan yang cukup. Pemerintah cenderung memusatkan investasi pada kawasan dengan potensi pengembalian ekonomi yang tinggi, seperti Jawa, dibandingkan wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tantangan geografis atau ekonomi lebih besar. Hal ini mengakibatkan ketimpangan yang signifikan, karena daerah lain tidak mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan fasilitas publik.

b. Ketimpangan dalam Infrastruktur

Salah satu akar utama ketimpangan ekonomi adalah perbedaan yang mencolok dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur antar wilayah. Di Pulau Jawa, jaringan transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api sangat maju, sehingga mendukung efisiensi dalam mobilitas barang dan jasa. Sebaliknya, wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan masih bergulat dengan infrastruktur yang minim, yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal (Farhan & Sugianto, 2022). Keterbatasan infrastruktur ini mempersulit akses masyarakat ke pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Selain itu, biaya logistik yang tinggi di wilayah-wilayah dengan infrastruktur minim semakin memperburuk daya saing ekonomi daerah tersebut di tingkat nasional maupun global.

c. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam

Banyak daerah di luar Pulau Jawa, terutama Papua, Kalimantan, dan Sumatra, memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, seperti tambang emas, batu bara, dan minyak bumi. Ketergantungan ini sering kali tidak diiringi dengan diversifikasi ekonomi yang memadai, sehingga membuat wilayah tersebut rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam ini sering kali tidak kembali kepada masyarakat setempat dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan (Azwina & Syahbudi, 2022). Bahkan, aktivitas ekstraksi sering kali merusak lingkungan

dan mengurangi potensi pengembangan sektor ekonomi lainnya, seperti pariwisata atau pertanian berkelanjutan.

d. Kontribusi Ekonomi yang Tidak Merata

Pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung telah mendominasi perekonomian Indonesia selama beberapa dekade. Kontribusi PDB dari Pulau Jawa mencapai lebih dari separuh total PDB nasional, sementara daerah-daerah di Indonesia Timur hanya menyumbang sebagian kecil. Ketimpangan ini mencerminkan pola konsentrasi ekonomi yang tidak sehat, di mana aktivitas ekonomi, industri, dan jasa terkonsentrasi di beberapa kota besar, sedangkan daerah lainnya tetap bergantung pada sektor primer yang kurang berkembang (Robbani & Mafruhah, 2023).

e. Akses Pendidikan yang Tidak Merata

Kualitas pendidikan yang buruk di daerah tertinggal menjadi salah satu hambatan besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. Akses ke pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional sering kali terbatas di wilayah-wilayah terpencil, sehingga mengurangi peluang masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah mereka (Farhan & Sugianto, 2022). Daerah dengan akses pendidikan yang lebih baik, seperti Pulau Jawa, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketimpangan dengan daerah lain.

f. Kesenjangan dalam Kebijakan dan Implementasi Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia yang dimulai sejak 2001 bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi sering kali dihadapkan pada kendala kapasitas pemerintah daerah yang rendah, kurangnya perencanaan yang matang, serta korupsi (Christia & Ispriyoso, 2019). Banyak daerah yang tidak mampu mengoptimalkan anggaran yang mereka terima, sehingga pembangunan tidak berjalan efektif. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan antar wilayah, terutama di daerah yang memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang lemah.

g. Ketidakseimbangan Investasi Swasta dan Pemerintah

Investasi dari sektor swasta dan pemerintah lebih banyak terkonsentrasi di wilayah dengan tingkat pengembalian yang tinggi, seperti Jawa dan Bali. Sementara itu, wilayah-wilayah seperti Papua dan Maluku sering kali dianggap kurang menarik bagi investor karena tantangan geografis, akses logistik yang sulit, dan minimnya infrastruktur pendukung (Panggarti et al., 2022). Ketimpangan dalam investasi ini menyebabkan daerah-daerah tertinggal semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya, karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun perekonomian lokal yang kompetitif.

B. Keterkaitan Antara Pusat dan *Periphery*

Keterkaitan antara pusat dan *periphery* di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan yang rumit antara wilayah yang lebih maju secara ekonomi, politik, dan sosial, seperti Pulau Jawa, dan wilayah yang lebih tertinggal di luar Jawa. Hubungan ini berakar pada pola pembangunan yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga era modern (Nurrohim et al., 2024). Dalam pola tersebut, wilayah pusat berperan sebagai motor utama ekonomi dan pengelolaan sumber daya, sedangkan wilayah *periphery* sering kali hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat yang signifikan dari pembangunan. Ketimpangan ini mempertegas peran sentral Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan nasional sekaligus mengisolasi *periphery* dari arus utama perkembangan ekonomi.

Pulau Jawa, dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan, telah menjadi penghubung utama dalam jaringan ekonomi nasional. Posisi ini memberikan keuntungan berupa akses terhadap infrastruktur yang lebih maju, investasi swasta yang tinggi, serta konektivitas yang memadai dengan pasar domestik dan internasional. Sementara itu, wilayah *periphery* seperti Papua, Kalimantan, dan Maluku sering kali tidak mendapatkan perhatian yang setara dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya (Rohmah, 2023). Ketimpangan ini mengakar pada kebijakan pembangunan yang sejak awal lebih terfokus pada wilayah pusat sebagai upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat.

Hubungan pusat dan *periphery* juga sangat dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi. Banyak wilayah *periphery* memiliki perekonomian yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, seperti tambang emas di Papua, batu bara di Kalimantan, dan minyak sawit di Sumatra. Sumber daya ini sering kali dikirimkan ke pusat untuk diolah atau dijual di pasar internasional, sementara pendapatan dari aktivitas tersebut tidak secara langsung kembali ke wilayah asal dalam bentuk pembangunan (Rohmah, 2023). Ketergantungan ini menciptakan pola hubungan yang tidak seimbang, di mana pusat terus memperkaya dirinya, sementara *periphery* tetap berada dalam kondisi keterbelakangan. Sebagai contoh, masyarakat di Papua sering kali tidak menikmati hasil dari tambang emas besar di daerah mereka, baik dalam bentuk pendapatan daerah yang signifikan maupun fasilitas publik seperti jalan atau layanan kesehatan.

Fenomena urbanisasi juga menjadi salah satu indikator penting dari keterkaitan antara pusat dan *periphery*. Kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, menjadi tujuan utama migrasi penduduk dari daerah pinggiran yang mencari pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik (Panggarti et al., 2022). Migrasi ini terjadi karena ketimpangan ekonomi dan kesempatan yang signifikan antara pusat dan *periphery*. Sayangnya, urbanisasi ini menimbulkan tantangan baru bagi kota-kota di pusat, seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin perkotaan, kemacetan, dan tekanan terhadap fasilitas umum. Di sisi lain, wilayah asal para migran kehilangan sumber daya manusia produktif yang

sebenarnya dapat berkontribusi terhadap pembangunan lokal. Akibatnya, daerah-daerah *periphery* semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan mereka, karena sumber daya yang mereka miliki tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan lokal.

Hubungan pusat dan *periphery* juga mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap pasar dan konektivitas. Wilayah pusat memiliki keunggulan dalam hal infrastruktur transportasi dan komunikasi, yang memungkinkan mereka untuk lebih terhubung dengan pasar nasional dan global (Christia & Ispriyarso, 2019). Sebaliknya, wilayah *periphery* sering kali mengalami isolasi akibat minimnya infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, petani di wilayah Papua mungkin memiliki hasil bumi yang berkualitas tinggi, tetapi sulit memasarkan produk mereka karena akses jalan yang terbatas atau biaya logistik yang sangat tinggi. Kondisi ini mengurangi daya saing produk dari daerah *periphery*, sehingga memperkuat dominasi wilayah pusat dalam rantai nilai ekonomi.

Selain itu, hubungan antara pusat dan *periphery* juga dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi yang diterapkan sejak tahun 2001. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya mereka sendiri (Christia & Ispriyarso, 2019). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya perencanaan pembangunan, dan kasus korupsi di tingkat lokal. Akibatnya, daerah-daerah *periphery* yang seharusnya mendapatkan manfaat lebih besar dari desentralisasi justru tetap mengalami keterbatasan dalam mengoptimalkan potensi mereka.

Meskipun demikian, hubungan pusat dan *periphery* sebenarnya memiliki potensi besar untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Wilayah *periphery* dapat menjadi penyuplai bahan mentah, sementara wilayah pusat dapat menjadi lokasi pengolahan dan distribusi produk akhir. Dengan pengelolaan yang baik, hubungan ini dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Misalnya, hasil tambang dari Kalimantan atau Papua dapat diolah menjadi produk bernilai tambah di pabrik-pabrik di Jawa, kemudian didistribusikan kembali ke daerah asal dengan harga yang lebih terjangkau (Fristikawati et al., 2022). Pendekatan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang proaktif, seperti redistribusi anggaran pembangunan, insentif investasi di daerah tertinggal, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara pusat dan *periphery* di Indonesia mencerminkan hubungan yang kompleks dan dinamis, tetapi sayangnya masih didominasi oleh pola ketergantungan yang tidak sehat. Untuk mengubah pola ini, diperlukan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi di pusat, tetapi juga pada pemberdayaan wilayah *periphery*. Melalui pendekatan ini, hubungan antara pusat dan *periphery* dapat berubah dari hubungan yang timpang menjadi hubungan yang saling

melengkapi, menciptakan keseimbangan dan kemajuan bersama di seluruh wilayah Indonesia.

C. Solusi Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Berbagai Wilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia merupakan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan strategis dan terpadu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Nurrohman et al., 2024). Berikut adalah tiga solusi utama yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, disertai dengan penjelasan rinci dan dasar hukum yang mendukungnya:

1. Redistribusi Anggaran dan Pemerataan Infrastruktur

Redistribusi anggaran pembangunan secara lebih adil dan merata ke seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal, merupakan langkah pertama untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Indonesia (Hulu & Wahyuni, 2021). Alokasi anggaran yang proporsional untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selama ini, Pulau Jawa mendominasi alokasi anggaran pembangunan karena statusnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Akibatnya, wilayah di luar Jawa, seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan, sering kali terpinggirkan dalam hal pengembangan infrastruktur (Farhan & Sugianto, 2022). Padahal, infrastruktur memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas wilayah, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mempercepat pergerakan barang, jasa, dan manusia.

Sebagai contoh, di Papua, minimnya infrastruktur transportasi menyebabkan biaya logistik menjadi sangat mahal. Hal ini tidak hanya menghambat pengembangan ekonomi lokal tetapi juga menurunkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Dengan redistribusi anggaran yang lebih adil, pemerintah dapat membangun jaringan transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi regional (Hartati, 2022). Selain itu, pembangunan infrastruktur listrik dan air bersih di daerah tertinggal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong investasi.

Lebih jauh lagi, redistribusi anggaran juga harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap daerah. Misalnya, di kawasan pesisir seperti Maluku, pengembangan infrastruktur pelabuhan dan kapal feri sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis perikanan. Sementara itu, di wilayah pertanian seperti Nusa Tenggara, irigasi dan akses jalan menuju pasar harus menjadi prioritas. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan

lokal. Dasar hukum mengenai solusi bagian pertama ini adalah (Rahim et al., 2023):

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara berdasarkan prinsip efisiensi, keadilan, dan pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam klaster infrastruktur, mempercepat pembangunan wilayah dengan menyederhanakan regulasi terkait proyek strategis nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memuat kebijakan prioritas untuk mengurangi ketimpangan wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Diversifikasi dan Insentif Investasi

Diversifikasi ekonomi lokal merupakan langkah penting untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Wilayah *periphery* yang selama ini bergantung pada eksploitasi sumber daya alam perlu mengembangkan sektor ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal (Robbani & Mafruhah, 2023). Pemerintah juga harus memberikan insentif bagi investasi yang mendukung pengembangan industri lokal dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Saat ini, banyak wilayah di luar Pulau Jawa hanya bergantung pada sektor primer, seperti pertambangan, perkebunan, atau perikanan. Ketergantungan ini membuat ekonomi lokal sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan sering kali tidak memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan inklusif.

Sebagai contoh, daerah pertanian di Sumatra dapat mengembangkan industri pengolahan hasil tani untuk menghasilkan produk bernilai tambah, seperti makanan olahan atau minyak nabati (Azwina & Syahbudi, 2022). Sementara itu, daerah dengan potensi pariwisata seperti Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dapat mengembangkan ekowisata yang melibatkan komunitas lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru. Diversifikasi ini membutuhkan dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri kreatif di daerah.

Selain itu, pemberian insentif investasi menjadi langkah penting untuk menarik minat investor masuk ke wilayah tertinggal. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, subsidi untuk pembangunan infrastruktur pendukung, atau kemudahan dalam perizinan. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang bersedia membangun pabrik di daerah terpencil atau mendirikan pusat pelatihan kerja untuk masyarakat setempat. Dasar hukum mengenai solusi kedua ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendukung pengembangan UKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur insentif bagi investor yang berkontribusi pada pembangunan wilayah tertinggal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kualitas SDM

Desentralisasi telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan. Namun, keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan (B. M. Morisson, 2020). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tertinggal menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Santi & Iskandar, 2021).

Banyak daerah tertinggal menghadapi kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan lokal. Kurangnya kompetensi di bidang perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan sering kali menyebabkan program pembangunan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah. Misalnya, pelatihan di bidang perencanaan strategis dan pengelolaan keuangan daerah dapat membantu pemerintah daerah mengelola anggaran mereka dengan lebih efisien dan transparan.

Selain itu, program pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat lokal harus diperluas untuk meningkatkan keterampilan mereka sesuai kebutuhan pasar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendirikan pusat pelatihan vokasi yang fokus pada industri lokal, seperti pariwisata, manufaktur, atau teknologi informasi. Di sektor pendidikan formal, pemerintah harus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal dengan membangun sekolah dan universitas yang berkualitas, serta memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Dasar hukum dari solusi yang ketiga ini adalah (Abikusna, 2019):

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketimpangan wilayah di Indonesia adalah tantangan multidimensional yang mencerminkan disparitas dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antara wilayah pusat seperti Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya. Masalah ini tidak hanya menghambat upaya pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi ancaman bagi kohesi sosial dan integrasi nasional. Penyebab utama ketimpangan meliputi kebijakan pembangunan yang terpusat di Jawa, ketimpangan infrastruktur, ketergantungan pada sumber daya alam, kontribusi ekonomi yang tidak merata, akses pendidikan yang tidak setara, kelemahan dalam implementasi desentralisasi, serta ketidakseimbangan investasi antara sektor swasta dan pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Redistribusi anggaran pembangunan dan pemerataan infrastruktur menjadi langkah awal yang krusial. Dengan alokasi anggaran yang lebih adil, daerah tertinggal dapat membangun fondasi yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, baik dalam hal transportasi, energi, maupun layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerataan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memberikan masyarakat di wilayah terpencil kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor ekonomi dan pemberian insentif investasi memainkan peran penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Ekonomi daerah yang selama ini terlalu bergantung pada sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan perlu diarahkan ke sektor-sektor baru yang berbasis pada potensi lokal, seperti pariwisata berkelanjutan, agroindustri, dan industri kreatif. Pemberian insentif fiskal dan kemudahan regulasi kepada investor yang bersedia membangun usaha di daerah tertinggal dapat mempercepat proses ini. Diversifikasi ekonomi juga memberikan perlindungan terhadap fluktuasi ekonomi global dan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat lokal.

Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi elemen kunci dalam solusi ini. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di wilayah mereka. Namun, tanpa kapasitas yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan, desentralisasi justru dapat memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mendukung daerah melalui pelatihan dan pendampingan, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat lokal. Pendidikan formal dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar

juga harus diperluas untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.

Upaya-upaya ini memerlukan kerangka kebijakan yang kuat dan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat. Undang-Undang Keuangan Negara, UU Penanaman Modal, UU Pemerintahan Daerah, dan berbagai peraturan lainnya sudah memberikan dasar hukum yang jelas untuk mendukung implementasi langkah-langkah ini. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Melalui redistribusi anggaran, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan tata kelola daerah, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia dapat berkembang secara merata dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan demikian, visi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dapat tercapai, sesuai dengan amanat konstitusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. (2019). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *SOSFILKOM Jurnal Sosial Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 1-15. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Azwina, R., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi di Provinsi Sumatera Utara tahun (2019-2021). *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 238-249. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1373>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *LAW REFORM*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dai, S. I. S., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). ANALISIS PENGARUH RLS, PENGELUARAN PERKAPITA, UHH, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KBI DAN KTI. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 535-544. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.950>
- Digdowiseiso, K., & Rengganisa, A. (2023). *View of Studi Literatur Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Mengangkat Perekonomian Ditengah Pandemi Covid19*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. <https://yripku.com/journal/index.php/msej/article/view/2703/1517>

- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–147. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Farhan, M. P., & Sugianto, S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA. *SIBATIK JOURNAL Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). PENGATURAN DAN PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA NUSANTARA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739–749. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>
- Hartati, Y. S. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116>
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 603–612. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.979>
- Katadata. (2022). *Capai Rp 274 juta, PDRB Per Kapita DKI Jakarta Tertinggi Nasional pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/74c44b0edb870d6/capai-rp-274-juta-pdrb-per-kapita-dki-jakarta-tertinggi-nasional-pada-2021>
- Morisson, B. (2022). Dampak Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kreativitas Masyarakat Dalam Meningkatkan Nilai Jual Produk. *KarismaPro*, 13(2), 107–116.
- Morisson, B. M. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi di PT. ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGES SUKABUMI). *KarismaPro*, 11(2), 27–42.
- Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.225>
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia. *FORUM EKONOMI*, 24(2), 288–298. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. Al, & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7012–7018. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>

- Ramadhan, F., Hidayat, M., & Murialti, N. (2024). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Jawa dan Bali: Pendekatan Spasial Ekonomi. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4497-4507. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1240>
- Robbani, N. A., & Mafruhah, A. Y. (2023). Analisis Pergeseran Pertumbuhan Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan Kota Bandung. *Bandung Conference Series Economics Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.5820>
- Rohmah, E. I. (2023). DINAMIKA OVERLAPPING KEWENANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NEGARA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 48-68. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490-506. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara KeProvinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/308>
- Simanjuntak, J. V., Muhammad, F., Aqilah, M. R. Al, Raihannah, N. A., & Bakti, H. G. P. (2024). Tampilan Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnalku*. <https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/801/741>